

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui netralitas aparatur sipil negara (ASN) di kantor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis menjelang Pemilu 2024. Netralitas bagi ASN menjadi dilema sekaligus merupakan 2 sisi yang bersinggungan, di satu sisi mereka adalah seorang perangkat pemerintahan yang tidak boleh menyatakan dukungan dan di sisi lain mereka adalah unsur sipil yang memiliki hak untuk memilih. Ketidaknetralan ASN sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ciamis. Politik birokrasi mengemukakan bahwa kekuatan birokrasi itu sendiri menjadi celah pelanggaran netralitas. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik meneliti mengenai netralitas politik ASN di Kantor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis menjelang Pemilu 2024.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun untuk teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman. Penelitian ini dalam menguji validitas data memakai uji validitas triangulasi sumber.

Adapun hasil penelitian ini mengemukakan bahwasannya masih terjadi ketidaknetralan ASN Kantor Kecamatan Ciamis. Terdapat ASN kelurahan yang melakukan ketidaknetralan di kegiatan media sosial yang dilarang konstitusi, yaitu menyukai postingan ajakan memilih, juga terdapat akun media sosial kelurahan yang digunakan untuk menyukai postingan ajakan memilih. Terakhir adanya upaya pembantuan camat untuk membantu menyelesaikan salah satu program pemenangan petahana. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas cakupan penelitian dengan tujuan mendapatkan data yang lebih komprehensif dari wilayah-wilayah sasaran utama penambahan suara.

Kata Kunci : Birokrasi, Netralitas Politik, Pemilu 2024 Ciamis

ABSTRACT

This study aims to determine the neutrality of state civil servants (ASN) at the Ciamis District Office, Ciamis Regency ahead of the 2024 Regional Election. Neutrality for ASN is a dilemma as well as 2 intersecting sides, on the one hand they are a government apparatus who may not express support and on the other hand they are civil elements who have the right to vote. ASN non-neutrality often occurs in Indonesia, including in Ciamis Regency. Bureaucratic politics suggests that the power of the bureaucracy itself is a loophole for violations of neutrality. Based on this, the researcher is interested in researching the political neutrality of ASN at the Ciamis District Office, Ciamis Regency ahead of the 2024 Regional Election.

The research method used is qualitative with a case study approach. As for data collection techniques, namely through observation, interviews and documentation. The analysis method uses the Miles and Huberman interactive analysis method. This study in testing the validity of the data uses the source triangulation validity test.

The results of this study suggest that there is still a lack of neutrality among ASN at the Ciamis District Office. There are ASN kelurahan who are not neutral in social media activities that are prohibited by the constitution, namely liking posts inviting people to vote, and there are also social media accounts at kelurahan that are used to like posts inviting people to vote. Finally, there are efforts to assist sub-district heads to help make one of the incumbent's winning programs a success. Further research is expected to expand the scope of the study with the aim of obtaining more comprehensive data from the main target areas for increasing votes.

Keyword : Bureaucracy, Political Neutrality, Regional Elections Cia

